

Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya untuk Mencapai Predikat Sekolah Unggulan

Muhammad Saiful Mujab

Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
e-mail: moh.saifulmujab@gmail.com

Desi Nurhikmahyanti, M.Pd.

Jurusan Pendidikan Non Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
e-mail: desilecturer@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan pedoman hidup bagi manusia yang berkeadaban. Sekolah suatu bentuk miniatur pada sebuah sistem pendidikan dan juga merupakan gambaran dari perkembangan masyarakat. Di era kontemporer dunia pendidikan banyak serangan yang menghambat dalam pertumbuhan dan perkembangan pada keunggulan *out put* yang akan dihasilkan. Menganalisa hal itu semua memang pendidikan tidak lepas dari suatu pembiayaan yang mempunyai hubungan kausalitas dan berperan penting dalam regulasi pendidikan, apabila dengan biaya yang mencukupi untuk melaksanakan pendidikan tidak akan menjadi penghambat untuk menciptakan pendidikan yang bermutu unggul.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis. (1) Pelaksanaan proses *budgeting* dalam penentuan penetapan anggaran untuk mencapai sekolah unggulan; (2) Pelaksanaan proses *accounting* dan *auditing* di MA Unggulan Amanatul Ummah. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Unggulan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan proses *budgeting* dalam penentuan penetapan anggaran untuk mencapai sekolah unggulan melaksanakan 5 (lima) proses yaitu: (a) Sumber Dana yang Bervariatif; (b) Kordinasi Setiap Program Jurusan; (c) Pengadaan Buku Hand Out; (d) Subsidi Silang; (e) Produk pembelajaran. (2) Pelaksanaan proses *accounting* dan *auditing* di MA Unggulan Amanatul Ummah. Pada *accounting*nya melaksanakan (*Accounting*) Pencatatan uang masuk dan keluar. Sedangkan di proses *auditing*nya (*Auditing*) pengawasan oleh BSM.

Kata Kunci : manajemen pembiayaan pendidikan, sekolah unggul

Abstract

Education is the basic life of civilized people. Moreover, school becomes a miniature of the education system and also as a representation of society development. In this era, education is attacked and it obstructs the development of output superiority as a result. Based on those phenomenons, education cannot be separated from budgeting which has causality relationship and has important role in educational regulation. With sufficient cost in implementation of education will not be an obstacle to creat superior quality of education

This research was aimed to describe and analyze (1) implementation of budgeting process in deciding the establishment of budget in order to achieve superior school label. (2) implementation of accounting and auditing process in MA Unggulan Amanatul Ummah. This research was conducted in Madrasah Aliyah Unggulan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya.

As a result, the school implemented five processes of budgeting process in deciding the establishment of budget in order to achieve *superior school label*. Those are (a) the fund sources which have variation; (b) Coordination of each program Department; (c) Procurement hand out books (d) Cross-subsidies (e) learning products. In addition, the school implemented the income and outcome entry in accounting process whereas the auditing process was controlled by BSM.

Key word : management of education budgeting, superior school.

PENDAHULUAN

Sebuah kehidupan itu memang memerlukan pegangan yang kuat untuk mengarahkan kita kejalur yang benar dan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, itu semua memang melalui sebuah pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang seharusnya tidak bisa lepas dalam kehidupan manusia, karena dibekali sebuah

pengetahuan manusia mampu menjadi makhluk tuhan yang seutuhnya.

Sesuai peribahasa “carilah ilmu sejak dini hingga ke liang lahat”, dari peribahasa tersebut menyatakan wajib dalam mencari ilmu. Mencetak peserta didik yang unggul berjiwa religius merupakan hal wajib yang harus tercipta bertujuan untuk penerus generasi bangsa ini, khususnya ini tanggung jawab pemerintah diharapkan

mampu mengemas sistem pendidikan yang menyajikan nilai-nilai hakikat mengenai pendidikan. Pendidikan sendiri mempunyai definisi yang terkandung pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Eksistensi untuk pengembangan sumber daya pendidikan itu yang terpenting terletak pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam pendidikan meliputi dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam dan, sarana dan prasarana. Sedangkan sektor eksternal meliputi masyarakat, kebijakan pemerintah, sosial budaya, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sekolah adalah bentuk miniatur pada sebuah sistem pendidikan dan juga merupakan gambaran dari perkembangan masyarakat. Di era kontemporer dunia pendidikan banyak serangan yang menghambat dalam pertumbuhan dan perkembangan pada keunggulan *output* yang akan dihasilkan. Menganalisa hal itu semua memang pendidikan tidak lepas dari suatu pembiayaan yang mempunyai hubungan kausalitas dan berperan penting dalam regulasi pendidikan, apabila dengan biaya yang mencukupi untuk melaksanakan pendidikan yang dicita-citakan tidak akan menjadi penghambat untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Seperti tayangan di liputan 6 pagi di SCTV pada hari senin tanggal (28/10/2013) menyatakan bahawa, ratusan siswa SD Negeri di Jember Jawa Timur membangun gedung sekolah dengan cara menyisihkan uang saku selama 6 tahun. Pernyataan tersebut juga sangat memprihatinkan tentunya dalam pendidikan kita meski ada dana dari pemerintah sebesar 20% dari APBN, maka dari itu untuk menjunjung tinggi pendidikan orang tua harus ikut andil pula.

Pembiayaan pendidikan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan merupakan satu indikator sangat penting dan juga didukung lingkungan yang kondusif. Stanley (Dadang Suhardan dkk 2012:70), ada tujuh unsur dalam menegakkan mutu pendidikan yang harus dibiayai:

1. *Human Resources,*
2. *Curriculum and Instruction,*

3. *Goal setting (standard of excellence for design and implementattion of operation),*
4. *Technology (standard technology for use),*
5. *Marketing,*
6. *Cutomer service,*
7. *Management (providing leadership of the quality improvement).*

Memang dalam menentukan pembiayaan pendidikan harus tepat untuk mengalokasikan sumber-sumber dana yang secara langsung guna mendukung peningkatan mutu atau spesialisasi lembaga yang tepat pada titik puncak yang diinginkan oleh lembaga tersebut.

Manajemen merupakan langkah utama dalam menentukan kordinasi di setiap lini yang sudah mendapatkan Tupoksi sendiri dibidang yang dinaunginya. Manajemen merupakan cabang ilmu yang bisa dikatakan relatif cukup muda, karena istilah lama yang dipergunakan adalah administrasi. Mengenai pengertian manajemen sendiri sangat bervariasi menurut para ahli yang menaungi ilmu tersebut.

Tokoh lain Terry menyebut manajemen sebagai sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain (George R. Terry, 2011:1). Maisyaroh (Daryanto dan Farid 2013:129), manajemen keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen merupakan kegiatan dalam menentukan sesuatu yang lebih baik dengan melakukan proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengevaluasi dengan sumber daya yang dimiliki suatu lembaga guna mencapai titik kulminasi yang diharapkannya dan sesuai konsep efektif dan efisien mencapai madrasah unggulan. Perlu diketahui juga kegiatan manajemen ini tidak hanya dilakukan oleh kegiatan yang *profite oriented* saja akan tetapi lembaga yang bergerak dibidang jasa pula juga sangat perlu baik mengelola skala luas seperti menggerakkan roda pendidikan disuatu lembaga secara menyeluruh, dan juga skala kecil semisal mengenai manajemen pembiayaan pendidikan.

Mengarah pada ranah manajemen pembiayaan ini merupakan konsep awal dalam menentukan suatu rencana yang telah digambarkan oleh seorang manajer. Ada proses di dalamnya untuk mengelola pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga. Proses yang ada di dalamnya meliputi tiga hal yaitu penyusunan anggaran

(*budgeting*), pembukuan (*accouting*), dan pemeriksaan (*auditing*), selain menjalankan proses pengelolaan diharapkan suatu lembaga juga menjalankan prinsip-prinsip manajemen yaitu: (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) efektifitas dan (4) efisiensi.

Pembiayaan pendidikan selama ini masih menetapkan rank utama dalam pandangan secara makro, isu yang selalu dibahas di ranah pemerintahan dalam menentukan anggaran belanja negara untuk fasilitasi pendidikan. Elchanan Cohn (Suharsaputra 2010:259) menyatakan sebagai berikut:

The issues that will concern us in this volume are conveniently grouped into five major categories (major issues in the economics of education):

- a. *Identification and measurement of the economic value of education*
- b. *The allocation of resources in education*
- c. *Teacher's salaries*
- d. *The finance of education, and*
- e. *Educational planning*

Penting sifatnya mengenai biaya pendidikan untuk menjalankan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam mendukung kegiatan disekolah yang intinya bagaimana pendidikan ini dibiayai atau didanai. Elchanan Cohn (Suharsaputra 2010:260) menguraikan lingkup pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

“Educational Finance, who should pay for education? Should the government support public and private education? If so, which level of government should take what share of the burden? And what share of total costs should be borne by the taxpayers as opposed to direct beneficiaries of the educational endeavor? Also, if subsidies are justified, should they be given to educational institution or to individual in the form of a voucher”.

Pengertian di atas sebenarnya tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pembiayaan pendidikan namun hanya menggambarkan pusat perhatian dalam kajian pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu bila ditarik kesimpulan mengenai pemahaman di atas, pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai, siap yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan

Nanang Fatah (2012:112) pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/*Mobile*, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK),

kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.

Keseluruhan yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan ini dinyatakan tepat guna dan tepat sasaran sehingga mampu memberi dampak pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan apabila pembiayaan pendidikan ini cukup memuaskan kepada *stakeholder* pendidikan, pembiayaan yang cukup efisien dan pembiayaan yang cukup adil dan sesuai dengan Standar pembiayaan pendidikan menurut Nanang Fatah (2012:61), diharapkan dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Menggambarkan mutu pendidikan yang ingin dicapai sesuai target peningkatan kualitas hidup disuatu negara.
2. Memperhitungkan keadaan empiris di tingkat sekolah yang dipengaruhi oleh proses manajerial tingkat sekolah maupun tingkat pemerintah.
3. Menggambarkan variasi antar daerah yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi fisik maupun nonfisik di suatu daerah, termasuk kemampuan manajerial tingkat daerah.

Dari paparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan pendidikan adalah kegiatan yang memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, sehingga mendukung untuk pengelolaan pendidikan yang layak untuk dibiayai dari uang yang diperoleh guna menciptakan mutu pendidikan yang unggul dan kompetitif.

Sesuai pembiayaan pendidikan yang Dimuat dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional, yaitu:

- a. Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UU RI tahun 1945
- c. Ketentuan mengenai tanggungjawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Banyak sumber keuangan sekolah yang tidak hanya berasal dari orang tua siswa (SPP dan SBP3) dan pemerintah akan tetapi juga berasal dari sumber-sumber lain, demikian sumber keuangan sekolah menurut Daryanto dan M farid (2013:135):

1) Dana dari Pemerintah

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah dalam DIK.

- 2) Dana dari orang tua siswa
Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran komite besarnya sumbangan yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat Komite Sekolah. Pada umumnya dana komite terdiri atas:
 - a. Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua siswa setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah.
 - b. Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayaran dapat diangsur)
 - c. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun
- 3) Dana dari Masyarakat
Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.
- 4) Dana dari Alumni
Bantuan dari alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar) namun dana dari alumni ini sifatnya tidak mengikat.
- 5) Dana dari Peserta Kegiatan
Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler.
- 6) Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah
Dana ini merupakan hasil berbagai kkegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya: koperasi, kantin sekolah, baza tahunan, wartel, usaha fotokopi.

Efektivitas pembiayaan pendidikan mengacu pada *input* dan *output*, karena dua proses ini saling kompatibel dalam menghasilkan tujuan yang diharapkan baik dalam peningkatan mutu pendidikan, profesional tenaga pendidik dan serta pelayanan pendidikannya.

Penghitungan efektifitas pembiayaan pendidikan ini bisa dilakukan dengan analisis efektifitas pembiayaan, Seperti yang diutarakan oleh McMillan dan Schumacher (Akdon dkk 2015:66), bahwa:

“Cost effectiveness analysis (CE) compares program outcomes (effectiveness) with costs of alternative program when the objectives of different program are similar and when common measure of effectiveness are used. Effectiveness could be measured by standardized achievement test, physiological test, or physical test.

Outcome measure need not be converted to monetary values, and the analysis is replicable”.

Ensiklopedi Manajemen (Mulyono 2010:88) menggunakan *budgeting* sebagai perencanaan dan koordinasi dari berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan prakiraan kebutuhan yang diperlukan dan hasil yang diinginkan serta pengawasan pelaksanaannya. Kenzevich (mulyono 2010:88) mengemukakan *budgeting* merupakan alat penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk biaya untuk setiap komponen untruk setiap komponen kegiatan. Prosedur penganggaran dilakukan dengan (1) menyusun ramalan tentang kemungkinan pendapatan dan belanja selama periode tertentu, (2) menetapkan anggaran berdasarkan ramalan, (3) statistik perencanaan dikumpulkan dan dibandingkan dengan dugaan-dugaan, (4) mengukur varian-varian dan menganalisis penyebab-penyebabnya, dan (5) melakukan perbaikan.

Menurut Idochi Anwar (2013:215), *Budgeting* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dalam kurun waktu tertentu. *Budgeting* menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan, dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastika penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati.

Fungsi dari penganggaran (*budgeting*), menurut Fatah (2000:49), anggaran disamping sebagai alat perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Ada tiga 3 fungsi anggaran yang mencakup tiga hal yaitu: 1. Sebagai alat penaksir, 2. Sebagai alat otoritas pengeluaran dana, dan 3. Sebagai alat efisiensi.

Pembukuan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi keuangan. Selain melakukan pencatatan *accounting* juga melakukan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, penafsiran laporan, dan lain sebagainya (Matin 2014:140). Tahap *accounting* pasti berawal dari Proses *budgeting*, anggaran itu terdapat dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran, tetapi pada sisi penerimaan biaya itu digolongkan berdasarkan sumber-sumber biaya dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sumber-sumber lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembukuan keuangan pendidikan di Indonesia, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-

32/MK/V/9/68 tanggal 26 September 1968, dan Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984; Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2/K/1982 tanggal 31 Maret 1982 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor SE-39/A/1990 tanggal 14 Maret 1990. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi itu wajib dibukukan, Mulyono (2010:178) antara lain:

- a) **Buku Pos (Value Book)**, hakikatnya memuat informasi beberapa dana yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran, pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam pembelanjaan uang harian.
- b) **Faktur**, berupa lembaran lepas yang dapat diarsipkan seperti faktur berisikan (1) maksud pembeli; (2) tanggal pembelian; (3) jenis pembelian; (4) rincian barang yang dibeli; (5) jumlah pembayaran; (6) tanda tangan pemberi kuasa.
- c) **Buku Kas**, menyatakan rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama.
- d) **Lembar Cek**, merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah sesuai transaksi.
- e) **Jurnal**, kepala sekolah sebagai pengawas keuangan harus membuka buku jurnal yang mana transaksi keuangan setiap hari dicatat.
- f) **Buku Besar**, merupakan pindahan dari semua kumpulan informasi dan jurnal hendaknya dipindahkan ke buku besar atau buku kas induk pada setiap akhir bulan.
- g) **Buku Kas Pembayaran**, berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah, dan sisa tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya.
- h) **Buku Kas Piutang**, berisikan daftar/catatan orang yang berutang kepada sekolah menurut jumlah uang, tanggal dan sisa utang yang belum dilunasi.
- i) **Neraca Percobaan**, untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggung jawaban keuangan secara tepat misalnya mingguan atau dua minggan.

Banyak hambatan yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan proses manajemen, maka perlu dalam menghadapi itu pasti lembaga mempunyai kekuatan yang dimiliki dan peluang yang dihadapi. Akdon dkk (2015:116) menjelaskan pada sub pembahasan refleksi organisasi, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). Menelaah penghambat dan pendukung yang timbul di pihak eksternal dan internal perlu adanya analisis yang berupa analisis SWOT, berguna mengetahui kondisi yang sifatnya dinamis.

1) Faktor Internal

Faktor internal yang perlu dianalisis adalah mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada pada dalam lembaga pendidikan itu sendiri yang meliputi seluruh faktor seperti visi dan misi, kinerja sekolah yang memungkinkan tercapainya pendidikan yang berkualitas, kejelasan informasi penggunaan dana, efektifitas penggunaan dana, adanya usaha unit sekolah, dan pengembangan potensi peserta didik. Kekuatan merupakan kelebihan atau senjata yang dimiliki oleh lembaga yang dioptimalkan oleh suatu lembaga dalam melaksanakan fungsi yang ada. Sedangkan kelemahan merupakan titik lemah yang dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya.

2) Faktor Eksternal

Pada faktor ini yang perlu diamati adalah peluang dan tantangan yang berasal dari luar lembaga. Faktor eksternal meliputi seluruh aspek yang berkembang diluar lembaga seperti kebijakan pemerintah, kondisi geografis dan demografis, SDM yang kurang komitmen dan adanya intervensi dari pihak luar.

Pemeriksaan atau audit penggunaan anggaran pendidikan adalah merupakan kegiatan melihat dengan teliti, menyelidiki, mempelajari, menelaah dan mengusut penggunaan anggaran pendidikan, termasuk mengusut tata cara pembukuannya, salah benarnya suatu hal, peristiwa yang telah dicatat, di tempatkan pada pos-posnya serta proses arus penerimaan uang dan barang yang dimiliki oleh suatu sekolah atau suatu unit kerja lainnya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (Matin 2015:197). Peran aktif juga diperhatikan pula dalam proses pengawasan berjalannya proses, pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat baik anggota masyarakat secara individual maupun kelompok dengan cara melihat, memperhatikan, memonitor, menilai dan melaporkan pelaksanaan kegiatan suatu unit kerja (Matin, 2015:192).

Pemeriksaan pelaksanaan anggaran pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mengecek dan meneliti kebenaran, keaslian, dan keabsahan dokumen-dokumen yang ada sebagai akibat telah terjadinya transaksi antara pihak-pihak yang terlibat, dan menelusuri setiap pencatatan terhadap semua buku yang digunakan dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut, baik penerimaan maupun pengeluaran uang, termasuk penerimaan dan pengeluaran barang. Tujuannya adalah untuk:

- a) Memberikan laporan penggunaan anggaran pendidikan setelah diperiksa oleh akuntan (pemeriksaan) kepada pengelola, pemilik, dan pihak-pihak lain secara independen.

- b) Menghindari kesalahan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang, dan arus penerimaan dan pengeluaran barang.
- c) Menghindari adanya penyimpangan atas proses pengelolaan keuangan dan barang.
- d) Membetulkan/mengoreksi kesalahan dan atau penyimpangan dalam proses pembukuan.
- e) Menghindari terulangnya kesalahan dan atau penyimpangan dalam proses pembukuan.
- f) Menciptakan kondisi penggunaan sumber daya pendidikan yang efisien dan efektif.

Menurut Hallak (1985:9) Menganalisis arus pembiayaan pendidikan ialah; (1) dengan meneliti gejala waktu pengeluaran pendidikan, dengan menyusun satu rangkaian waktu yang lama, dimungkinkan untuk menilai kecenderungan secara umum dari adanya perubahan dalam arus pembiayaan pada tahun-tahun yang baru lewat, (2) analisis biaya pendidikan memberikan beberapa indikasi berharga mengenai kecenderungan waktu arus pembiayaan tetapi tidak sama sekali memberikan keterangan mengenai besar usaha pembiayaan yang berhubungan dengan itu yang berbeda-beda, (3) produk nasional bruto ialah kumpulan perkiraan nasional, menggambarkan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Berpacu dari penjelasan para tokoh di atas peneliti menyimpulkan, bahwa analisis pembiayaan itu perlu dilakukan untuk melakukan kebijakan baru dalam meningkatkan sistem, mempertimbangkan waktu pengeluaran dan kecenderungan waktu dalam melakukan program.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Kualitatif. Rancangan penelitian menggunakan studi kasus. Penelitian ini dilakukan Jl Siwalankerto Utara No 56 Wonocolo, Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Surabaya untuk menuju sekolah berlabel madrasah unggulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi partisipasi pasif, dan studi dokumentasi. Adapun beberapa informan yang diwawancarai yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, kordinator setiap program. Wawancara dilakukan sesuai dengan fokus penelitian yaitu: (1) pendekatan proses budgeting dalam penentuan penetapan anggaran untuk mencapai sekolah unggulan; (2) Pelaksanaan proses accounting dan auditing di MA Unggulan Amanatul Ummah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2014:247). Menurut Sugiyono (2014:249) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:249) menyarankan dalam melakukan *display data*, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya.

Penyajian data dilakukan dengan memberikan sekumpulan informasi yang tersusun rapi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Sugiyono (2012:345), menyatakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik sesuai dengan pendapat Sugiyono (2012:366), dalam uji keabsahan data dapat menggunakan teknik-teknik antara lain: (1) kredibilitas, (2) tranferabilitas, (3) dependabilitas, (4) konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian di Madrasah Aliyah Unggulan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan proses budgeting dalam penentuan penetapan anggaran untuk mencapai sekolah unggulan; (2) pelaksanaan proses accounting dan auditing di MA Unggulan Amanatul Ummah.

Pelaksanaan Proses *budgeting* dalam Penentuan Penetapan Anggaran untuk Mencapai Sekolah Unggulan.

a. Sumber Dana yang Bervariatif

Sekolah yang unggul jika tidak di suport dengan biaya yang memadai secara efektif dan efisien. MA Unggulan Amanatul Ummah mempunyai sumber dana dari berbagai sumber yaitu BOS dan BOPDA, Infaq (SPP), dan usaha-usaha yang dimiliki oleh yayasan. Kemampuan ketua yayasan, kepala sekolah dan bendahara berperan penting untuk mehidupkan pendidikan yang unggul. Keuangan yang diolah dengan kecerdasan

untuk menjalankan roda pendidikan sangat berperan penting, tentunya banyak hambatan yang ditemui ketika dalam membiayai pendidikan jadi dengan cara subsidi silang, saldo tahun kemaren juga bisamenjadi alternatif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada manajemen pembiayaan pendidikan, selain mengandalkan sumber dana dari pihak swasta.

b. Kordinasi Setiap Program Jurusan

Sekolah yang unggul jika tidak di suport dengan biaya yang memadai secara efektif dan efisien. MA Unggulan Amanatul Ummah mempunyai sumber dana dari berbagai sumber yaitu BOS dan BOPDA, Infaq (SPP), dan usaha-usaha yang dimiliki oleh yayasan. Kemampuan ketua yayasan, kepala sekolah dan bendahara berperan penting untuk mehidupkan pendidikan yang unggul. Keuangan yang diolah dengan kecerdasan untuk menjalankan roda pendidikan sangat berperan penting, tentunya banyak hambatan yang ditemui ketika dalam membiayai pendidikan jadi dengan cara subsidi silang, saldo tahun kemaren juga bisamenjadi alternatif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada manajemen pembiayaan pendidikan, selain mengandalkan sumber dana dari pihak swasta.

Perencanaan penentuan biaya yang dilakukan oleh MA Unggulan Amanatul Ummah yaitu melalui rapat kerja tahunan. Setiap kordinator jurusan berhak merumuskan kebutuhan satu tahun kedepan yang akan dibahas pada agenda kegiatan rapat kerja tahunan tersebut membahas program kerja pada setiap pogram jurusan beserta kegiatan-kegiatan dalam satu tahun kedepan yang menunjang siswa-siswa yang kompetitif dan unggul. setiap program sebelumnya telah melaksanakan rapat penentuan anggaran skala kecil yang melibatkan koordinator dan jajaran penanggung jawabnya, dari hasil ini akan dibawa ke rapat tahunan madrasah yang setiap koordinator program jurusan memaparkan kebutuhan pembiayaannya masing-masing, tentunya kegiatan ini juga mengestimasi dana yang akan menjalakan program kerja kedepan. Banyaknya program jurusan yaitu program unggulan, program CI (cerdas istimewa), program Excelent dan program MBI (Madrasah Bertaraf Internasional) ini semua perlu dana yang tepat dan akurat untuk benar-benar terciptanya sekolah unggul.

c. Pengadaan Buku Hand out

Kegiatan ini juga diperhatikan oleh madrasah untuk selalu mengembangkan para guru untuk membuat pakem pembelajaran yang akan dipakai selama satu tahun ajaran yang akan dijalankan.

Pembuatan buku hand out ini tentunya juga ada anggaran sendiri oleh madrasah yang mana guru dituntut untuk membuat hand out. Proses ini secara langsung bisa meningkatkan kualitas guru sekaligus juga guru mampu memahami gaya pengajarannya yang akan disampaikan kepada peserta didik. Tujuan itu semua selain meningkatkan sistem dan asatidz, sekaligus juga mampu meningkatkan kualitas madrasah mencapai predikat sekolah unggul

d. Subsidi Silang

Proses budgeting MA Unggulan Amanatul Ummah juga melakukan Sistem subsidi silang. Langkah ini bisa membantu dalam berjalannya proses pembiayaan pendidikan, ini merupakan solusi penanganan hambatan yang di alami madrasah dengan menggunakan saldo dana yang tersisa di tahun ajaran sebelumnya sehingga proses pembiayaan tetap jalan seperti halnya biasanya. Hambatan yang ada pada MA Unggulan Amanatul Ummah adalah lambatnya pendistribusian uang dari pemerintah dan adanya siswa yang dipandang kurang mampu segi materinya selain mendapatkan dana bantuan siswa miskin, karena proposal pengajuan dibuat siswa miskin tidak selalu lancar dalam pencairan dananya, sehinggal dalam menggapai cita-cita madrasah tidak ada hambatan serius untuk menuju sekolah yang unggul.

e. Produk pembelajaran

Proses budgeting pada MA Unggulan Amanatul Ummah ini memang mengedepankan sektor pembelajaran yang ada pada masing-masing program jurusan, karena pogram jurusan ini adalah element penting untuk mencapai sekolah yang berlabel unggul, baik unggul dalam akademisnya maupun non akademis karena madrasah ini memakai sistem *boarding scholl*. Jadi sektor ini sangat prioritas sekali dalam pembiayaannya baik dalam pembelajaran pada sistem ataupun pembiayaan pada tenaga pendidik juga. Produk pembelajaran ini juga sangat penting tentunya juga perlu perhatian dalam pembiayaan, karena dengan adanya banyak program khusus yang dimiliki oleh madrasah juga perlu pembiayaan dalam menjalankan seluruh kegiatan yang ada pada masing-masing program, seluruh itu dengan tujuan untuk mendukung proses pembelajaran untuk menjadikan sekolah yang unggul

Pelaksanaan Proses *Accounting* dan *Auditing* di MA Unggulan Amanatul Ummah.

a. Pencatatan uang masuk dan keluar (*Accounting*)

MA Unggulan Amanatul Ummah memang dikategorikan sekolah yang mampu menciptakan

out put yang berkualitas sehingga menjadikan sekolah yang unggul dan menjadi pandangan utama bagi masyarakat yang berminat, akan tetapi unggul itu tidak lepas dari itu saja dari keseluruhan proses pun juga harus bisa dikategorikan unggul, sebagai sekolah mampu melaksanakan Transparansi, salah satunya proses *accounting* yang juga menentukan betul dalam mencapai sekolah berlabel unggul, *accounting* sebagai bentuk pedoman audit internal maupun eksternal, dengan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pendanaan di masing-masing program, karena sedikit kesalahan itu bisa citra sekolah makin surut, sehingga pada proses *accounting* bendahara mampu mencatat sirkulasi keuangan yang berawal dari penerimaan dana pembiayaan sampai pengeluaran dana pembiayaan pendidikan tersebut yang dicatat pada buku induk keuangan yang dimiliki bendahara. Tujuan dari proses *accounting* tersebut sebagai bahan dasar pada tahap *audit*.

Alur kegiatan *accounting* setelah disahkannya anggaran pada rapat tahunan, setiap uang masuk bendahara mencatatnya. Masing-masing program jurusan ketika mengadakan kegiatan atau melaksanakan program kerja, kordinator wajib membuat proposal pencairan dana yang diajukan kepada ketua yayasan untuk mendapatkan ACC (*accept*) dan setelah itu diajukan ke bendahara. Tidak lepas dari situ, setiap selesai pelaksanaan program, kordinator wajib langsung melaksanakan laporan keuangan kepada bendahara sehingga proses pencatatan ini tidak ada satupun yang terlewatkan.

b. Pengawasan oleh Tim Audit Independent (*Auditing*)

MA Unggulan Amanatul Ummah dalam proses audit ini melakukan kerjasama dengan pihak independent yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk mengawasi sirkulasi yang ada pada madrasah, dalam hal pembiayaan pendidikan ini MA Unggulan Amanatul Ummah memakai jasa tim audit independent untuk mengaudit kesehatan keuangan yang ada pada madrasah, karena tugas auditor ini berawal dari awal proses pembiayaan yang tujuannya untuk mengontrol sesuai data pendukung dan yang terpenting tim audit independent ini tidak adanya kepentingan dalam lembaga, dengan tidak adanya niat meyalahkan akan tetapi membantu pada kesulitan dan memberikan masukan, dengan agenda audit internal setiap bulannya selalu ada rapat bulanan yang pengauditan baiki audit mutu maupun audit keuangan. Rapat Audit ini melibatkan seluruh element penting yaitu auditor keuangan, bendahara,

koordinasi setiap program dan kordinator pondok pesantren.

Pelaksanaan Proses Budgetting dalam Penentuan Penetapan Anggaran untuk Mencapai Sekolah Unggulan

1. Penganggaran pembiayaan pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah faktor yang sangat mendukung untuk melaksanakan semua kegiatan program kerja yang direncanakan dalam jangka waktu satu tahun kedepan, ini semua diolah dan diatur oleh seorang pemimpin atau kepala madrasah mampu memanfaatkan SDM yang ada dalam merumuskannya dan mengalokasikannya dana yang diperuntukkan, sejalan dengan pendapatnya Maisyaroh (Daryanto dan Farid 2013:129), manajemen keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Yang dinamakan kegiatan manajemen tersebut dimulai dari perencanaan anggaran, pencatatan uang keluar masuk sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. Memang pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan kepala madrasah tidak bisa berjalan dengan sendirinya, dengan kecerdikan dan memahami peluang tentunya kepala mdrasah mampu memanfaatkan kerjasama-kerjasama dengan organisasi independen yang mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan dengan harapan sirkulasi keuangan mampu berjalan apa yang diharapkan.

Temuan penelitian dalam proses budgeting yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah terdapat 5 (lima), (a) Rapat Kerja Tahunan; (b) Sumber Dana yang bervariasi; (c) Relationship; (d) Subsidi Silang; (e) Produk pembelajaran. Rapat kerja tahunan merupakan tahap awal yang sangat menentukan untuk menjalankan roda kehidupan suatu lembaga pendidikan, seluruh element madrasah dituntut untuk bersama-sama merumuskan rencana kedepannya dan tentunya juga proses budgetting masuk didalamnya sesuai dengan proporsi program yang akan dilaksanakan, dan disini wali santri juga ikut terlibat tapi berupa masukan-masukan yang diberikannya.

Semua itu akan menghasilkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), dari RKT para anggota rapat merumuskan pendanaan pada setiap komponen-komponen yang telah dihasilkan. Penentuan besar kecilnya biaya pendidikan itu sesuai dengan proporsional rencana kerja yang akan dilaksanakan ini sudah terlampir pada draft Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Madrasah (RKATM), draft tersebut akan diteruskan untuk pengajuan pembiayaan pendidikan kepada pemerintah yang biasa disebut RAPBS, guna untuk mendapatkan dana dari pemerintah yang berupa dana tiap-tiap siswa yang akuntabel (lampiran 14; halaman 213). Seluruhtahap manajemen pembiayaan pendidikan

di madrasah ini melibatkan auditor internal dari tim independent yang ditunjukkan langsung oleh kepala yayasan dengan tujuan sebagai *controller* pada 3 proses untuk membantu dan meningkatkan sistem kerja manajemen pembiayaan

Menuju sekolah unggul tentunya pula tidak lepas dari finansial, tanpa biaya program tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan bagi kepala madrasah khususnya dan semua masyarakat sekolah umumnya, untuk mencapai sekolah unggul. Dengan keunggulan di MA Amanatul Ummah Surabaya yang mempunyai segudang program kerja yang ditawarkan kepada konsumen pendidikan, Terdapat 7 keunggulan, yaitu: (a) Terakreditasi A, (b) Dauroh, (c) 24 *Hours Care System*, (d) Beasiswa dan *living cost* kemenag RI, (e) Bahasa arab dan bahasa inggris, (f) Bimbingan Masuk Perguruan Tinggi Negeri, (g) Diterima di perguruan tinggi terkemuka. Formasi yang dimiliki oleh madrasah yang mempunyai 7 (tujuh) keunggulan tersebut tentunya dalam segala sektor manajemennya yang dilakukan oleh kepala madrasah tentunya sifatnya kompleks baik dari humasnya, kurikulumnya, kesiswaannya dan sistem pengajarannya ini tentunya sudah ditingkatkan signifikan mungkin dengan perhatian pembiayaan yang jugala lebih, dan pendapat ini sepemikiran dengan pendapatnya Stanley (Dadang Suhardan dkk 2012:70), bahwa ada tujuh unsur dalam menegakkan mutu pendidikan yang harus dibiayai, yaitu (a) *Human Resources*; (b) *Curriculum and Instruction*; (c) *Goal setting (standard of excellence for design and implementation of operation)*; (d) *Technology (standard technology for use)*; (e) *Marketing*; (f) *Customer service* dan (g) *Management (providing leadership of the quality improvement)*.

Sebagai madrasah yang akuntabel dan transparatif, dalam pelaksanaan rapat kerja tahunan madrasah melibatkan semua unit yang ada pada struktur organisasi yayasan Pondok Pesantren, mitra kerja madrasah dan perwakilan wali santri. Kegiatan rapat tahunan ini semua formulasi pembiayaan telah dirumuskan oleh masing-masing kordinator akan tetapi dalam penentuannya bersifat supremasi.

Pembiayaan pendidikan tersebut biaya operasional, investasi dan biaya personal hanya dipergunakan untuk kegiatan yang hal-hal yang ada kaitannya dengan proses kegiatan belajar mengajar saja sebagaimana disebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 Pasal 3 ayat 3, Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: (a) biaya investasi, yang terdiri atas: (1) biaya investasi lahan pendidikan; dan (2) biaya investasi selain lahan pendidikan; (b) biaya

operasi, yang terdiri atas: (1) biaya personalia; dan (2) biaya nonpersonalia.

Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Surabaya ini mengedepankan proses dan para asatidz, dimana 2 (dua) unsur ini yang mampu menjunjung tinggi nilai kualitas madrasah dengan berbagai model program khusus yang diterapkan oleh madrasah dan juga merangkul sebagian instansi lain guna untuk bekerjasama saling menjunjung tinggi kualitas para peserta didik, dari 4 program khusus (1) Madrasah Unggulan; (2) Madrasah Bertaraf Internasional; (3) *excellent*; dan (4) Cerdas Istimewa, dari aspek ini mendapatkan perhatian pendanaan yang lebih dalam melaksanakannya. begitupun program jurusan *Excellent* dan CI penekanan pembiayaan ada pada, berupa *try out* yang sifatnya harus dilaksanakan, baik *try out* akabar mmaupun *try out* internal CI sendiri. Dengan tujuan mengetahui kemampuan siswa. Setelah itu *try out* dibahas tuntas dengan asumsi siswa mampu memahami dan mengerti, Karena tidak akan ada *try out* selanjutnya jika *try out* sebelumnya siswa tidak memahami secara seksama.

Tidak hanya itu saja kesejahteraan para asatidz juga menjadi perhatian betul oleh Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah dengan tujuan mencapai sekolah berlabel Madrasah Unggulan, dengan kualitas para asatidz yang mampu mentransfer ilmu kepada murid-murid itu tidak lepas dengan adanya pemberdayaan kualitas guru dan juga perlu akan mendapatkan apresiasi. Ini juga mendapatkan perhatian akan pembiayaan pendidikan. berdasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Madrasah unsur pengeluaran pembiayaan pendidikan Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah dapat dikategorikan ke dalam item pengeluaran yaitu: (a) Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran; (b) Pengeluaran untuk tata usaha madrasah; (c) Pemeliharaan sarana-prasarana madrasah; (d) Administrasi; (e) Pembinaan teknis edukatif; dan (f) Pendataan.

Hasil penelitian di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah sesuai dengan pendapat Idochi Anwar (2013:13), tentang perubahan pendekatan itu menuntut agar sekolah: (1) memiliki *sense of quality*; (2) memahami kebutuhan pasar; (3) menetapkan wawasan mutu dan wawasan keunggulan; dan (4) mengubah pola pengajarannya. Seluruh model perubahan juga terlihat baik dari pendanaan dari RAPBS ini khusus hanya dipergunakan untuk operasional madrasah dan dana yang bersumber dari infaq (SPP) itu dipergunakan untuk madrasah dan pondok pesantren. Mengingat madrasah ini menerapkan *full day school* dan banyak pengulangan mata pelajaran (DAUROH), dan banyaknya kegiatan *try out* yang berulang, baik *try out* UNAS maupun *Try Out* SNMPTN, sehingga perlu adanya dana tambahan berupa

infaq (SPP), dengan kecerdikan para pengelola pembiayaan pendidikan sehingga mampu mengalokasikan dana secara tepat guna dan tepat sasaran dalam mengukur besaran pembiayaan pada masing-masing program.

2. Sumber Pendanaan Pendidikan

Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah merupakan sekolah swasta dibawah naungan lembaga pondok pesantren, tentu dalam aspek sumber pendanaan pendidikan ini tidak hanya dari RAPBS yang bersumber dari pemerintah saja akan tetapi juga berasal dari infaq (SPP) dan usaha-usaha yang dimiliki oleh lembaga pondok pesantren. Sejalan dengan Daryanto dan M Farid (2013:135) sumber pendanaan berasal dari: (1) dana dari pemerintah; (2) dana dari orang tua siswa; (3) dana dari masyarakat; (4) dana dari alumni; (5) dana dari peserta kegiatan; dan (6) dana dari kegiatan wirausaha sekolah.

RAPBS pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan atau pendapatan sekolah dan pengeluaran atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Pendapatan dana pembiayaan yang berupa infaq (SPP) ini bahwa Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah bermitra dengan Bank Syariah Mandiri, semua transaksi pembayaran sudah melalui Bank sebagai pihak ketiga mitra kerja dengan lembaga, dengan memfungsikan Bank Syariah Mandiri berupa BSMCard yang sebagai pengganti kartu pelajar. Dari keseluruhan Bank Syariah Mandiri yang sebagai transaksi pembayaran infaq (SPP), itu juga sebagai transaksi pembayaran gaji guru, sehingga guru tidak perlu menemui bendahara ketika menerima gaji bulanan.

Meski sumber pembiayaan pendidikan yang bervariasi, MA Unggulan Amanatul Ummah juga pernah mengalami hambatan dalam proses pembiayaan pendidikan, seperti halnya selama ini mengalami terlambatnya pencairan dana yang dari RAPBS dan juga sebagian santri terlambat akan pembayaran infaq (SPP). Penanganan yang diterapkan oleh pihak madrasah yaitu subsidi silang, yang mana saldo anggaran tahun lalu dipergunakan untuk tahun yang akan datang, selain itu juga madrasah merupakan milik lembaga pondok pesantren yang ditopang dana dengan adanya usaha-usaha yang dimiliki lembaga seperti; (1) KBIH; (2) Usaha ternak dan pertanian.

Pelaksanaan Proses Accounting dan Auditing di MA Unggulan Amanatul Ummah.

1. Pencatatan Pembiayaan Pendidikan

Proses manajemen pembiayaan dirasa sempurna jika proses proses selanjutnya dilaksanakan dengan cara yang semestinya, seluruh kegiatan pembiayaan pendidikan pasti ada hal catat mencatat, penggolongan dana guna untuk mengetahui besaran dana dan jenis dana baik yang masuk maupun keluar, tentunya ini merupakan

tugas wajib bagi seluruh bendahara untuk melaksanakannya sejak awal kegiatan budgetting, karena kegiatan ini merupakan sebagai bukti yang mana dana pendidikan diperuntukkan apa saja sehingga dengan kegiatan accounting ini mampu memberi bukti ketika pengawasan dilaksanakan.

Bendahara Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah dalam melakukan pencatatan ini dibukukan ke dalam buku besar sebagai pusat informasi penggunaan dana yang telah keluar, karena setiap bulannya ada pelaporan keuangan kepada tim audit internal madrasah, jadi kegiatan pembiayaan pendidikan di MA Amanatul Ummah semua dalam pencairan dana pada setiap melaksanakan program kerja itu harus membuat proposal kegiatan dengan adanya perincian pembiayaan dengan maksud untuk pencatatan yang akan dilakukan oleh bendahara, begitu pun juga sebaliknya ketika selesainya kegiatan wajib melaksanakan LPJ kepada bendahara agar ada informasi tertulis yang dibuat bukti oleh seorang bendahara ketika tahap pengawasan, kegiatan tersebut berlaku kepada semua kegiatan baik yang dilakukan oleh program jurusan maupun madrasah sendiri, sepemikiran dengan pendapat (Matin, 2014:140), Bahwa selain melakukan pencatatan *accounting* juga melakukan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, penafsiran laporan, dan lain sebagainya. Berbagai laporan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing koordinator jurusan maupun madrasah sendiri, bendahara melaksanakan pencatatan yang sesuai dengan dengan golongan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan seperti halnya pembiayaan yang diperuntukkan pembelajaran beda halnya dengan pembiayaan yang diperuntukkan kegiatan perlombaan, jadi bendahara mempunyai banyu buku catatan dalam pencatatan uang keluar maupun uang masuk dan akhirnya bermuara pada buku besar yang sudah terintegrasi pada setisap buku pencatatan, pernyataan ini sejalan dengan Mulyono (2010:178), Semua hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi itu wajib dibukukan antara lain: (1) Buku Pos (*Value Book*); (2) Faktur; (3) Buku Kas; (4) Lembar Cek; (5) Jurnal; (6) Buku Besar; (7) Buku Kas Pembayaran; (8) Buku Kas Piutang; dan (9) neraca percobaan. Semua merupakan buku kegiatan bendahara dalam melaksanakan accounting pembiayaan pendidikan.

2. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

Kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan di MA Unggulan Amanatul Ummah tidak akan sempurna jika kegiatan pengawasan ini tidak dilaksanakan secara seksama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pengawasan ini sangat penting yang mana bisa mengetahui kesehatan dalam konteks keuangan madrasah. Pemeriksaan atau audit penggunaan anggaran pendidikan adalah merupakan kegiatan melihat dengan

teliti, menyelidiki, mempelajari, menelaah dan mengusut penggunaan anggaran pendidikan, termasuk mengusut tata cara pembukuannya, salah satunya suatu hal, peristiwa yang telah dicatat, di tempatkan pada pos-posnya serta proses arus penerimaan uang dan barang yang dimiliki oleh suatu sekolah atau suatu unit kerja lainnya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Manajemen pembiayaan di MA Unggulan Amanatul Ummah ini telah memenuhi syarat sekolah unggul dengan teori Matin (2015:197) bahwa Kegiatan pengawasan serta pertanggung jawaban di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah dilaksanakan pada setiap bulan sekali yang dilaksanakan oleh tim audit internal, dalam hal ini madrasah mitra kerja dengan tim audit keuangan yang sifatnya independent yang berasal dari Malang.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim audit independent ini sistemnya tidak terencana, akan tetapi sifatnya spontanitas dengan tujuan supaya bendahara selalu melaksanakan sistem sebagai bendahara yaitu pencatatan setiap harinya, auditor ini bertujuan untuk tidak adanya kepentingan dalam lembaga, dengan tidak adanya niat meyalahkan akan tetapi membantu pada kesulitan dan memberikan masukan. Dengan ini sangat mempermudah bagi bendahara untuk kegiatan audit eksternal yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerintah kota Surabaya, pada akhir tahunnya dan juga mampu mentransparasikan dana yang telah dipakai kepada masyarakat sekolah khususnya dan umumnya untuk wali santri, pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat baik anggota masyarakat secara individual maupun kelompok dengan cara melihat, memperhatikan, memonitor, menilai dan melaporkan pelaksanaan kegiatan suatu unit kerja, sistem transparansi tersebut mendukung teorinya (Matin, 2015:192), bahwa Setiap akhir tahun bendahara melaporkan kegiatan keuangan yang telah dipakai, ini semua terangkum pada laporan pertanggungjawaban keuangan, agar pemerintah mengetahui penggunaan keuangan di madrasah ini dipergunakan hanya untuk kegiatan operasional madrasah.

PENUTUP

Simpulan

Beberapa pernyataan sebagai simpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses *budgeting* dalam penentuan penetapan anggaran untuk mencapai sekolah unggulan: (a) Rapat Kerja Tahunan, Perencanaan penentuan biaya yang dilakukan oleh MA Unggulan Amanatul Ummah yaitu melalui rapat kerja tahunan; (b) Sumber Dana yang bervariasi,

Mustahil adanya sekolah yang unggul jika tidak di suport dengan biaya yang memadai secara efektif dan efisien. MA Unggulan Amanatul Ummah mempunyai sumber dana dari berbagai sumber yaitu BOS dan BOPDA, Infaq (SPP), dan usaha-usaha yang dimiliki oleh yayasan. (c) Relationship, MA Unggulan Amanatul Ummah dalam transaksi pembayaran sudah bekerja sama dengan BANK Mandiri Syari'ah. Relationship bisa memudahkan dalam semua kegiatan pembiayaan pendidikan mencapai sekolah unggul; (d) Subsidi Silang, Proses budgeting MA Unggulan Amanatul Ummah juga melakukan Sistem subsidi silang, merupakan solusi penanganan hambatan yang di alami madrasah sehingga proses pembiayaan tetap jalan seperti halnya biasanya; (e) Produk pembelajaran, Proses budgeting pada MA Unggulan Amanatul Ummah ini memang mengedepankan sektor pembelajaran yang ada pada masing-masing program jurusan, karena pogram jurusan ini adalah element penting untuk mencapai sekolah yang berlabel unggul.

2. Pelaksanaan proses accounting dan auditing di MA Unggulan Amanatul Ummah.

(a) (*Accounting*) Pencatatan uang masuk dan keluar, MA Unggulan Amanatul Ummah memang dikategorikan sekolah yang mampu menciptakan *out put* yang berkualitas sehingga menjadikan sekolah yang unggul, melakukan pencatatan ini dibukukan ke dalam buku besar sebagai pusat informasi penggunaan dana yang telah keluar; (b) (*Auditing*) pengawasan oleh Tim Audit Independent, MA Unggulan Amanatul Ummah dalam proses audit ini melakukan kerjasama dengan pihak independent yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk mengawasi sirkulasi yang ada pada madrasah, dalam hal pembiayaan pendidikan ini MA Unggulan Amanatul Ummah memakai jasa tim audit independent untuk mengaudit kesehatan keuangan yang ada pada madrasah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh seluruh *stakeholder* di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Surabaya maupun pihak-pihak yang terkait lainnya dalam penelitian ini. Beberapa saran tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Madrasah hendaknya dalam penentuan penganggaran itu juga melibatkan semua lapisan asatidz, sehingga asatidz mampu merencanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan dana

yang direncanakannya sendiri oleh tiap asatidz, hand out guru pun juga ada dan terencana oleh guru tersebut. Karena MA Unggulan Amanatul Ummah merupakan sekolah berasrama, antara asrama dan formal mempunyai keterkaitan seharusnya juga para asatidz pondok juga dilibatkan untuk merencanakan anggaran madrasah diniyahnya.

2. Bendahara seharusnya melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang transparansi pada keuangan sangat penting karena faktor unggul juga dilihat dari kemampuan menjalankan konsep-konsep manajemen pembiayaan pendidikan kepala sekolah memaparkan uang masuk dan uang keluar yang telah dicatat oleh bendahara. Transparansi pendanaan bisa dilakukan dengan hard copy dan bisa juga melalui *website* madrasah mengenai seluruh uang masuk dan uang telah terpakai dalam menjalankan proses belajar mengajar, jadi tidak hanya melibatkan sebagian wali santri yang mengikuti rapat bulanan dan tahunan yang mengetahui keadaan keuangan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, Kurniady, Darmawan. 2015. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Anwar, Idochi. 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu PendektanPraktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fatah, Nanang. 2012. *Satandar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Hallak J. 1985. *Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan*. Jakarta: Bhrtara Karya Aksara.
- Matin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Poynton, Lapan, Marcotte. 2014. *Financial Planning Strategis of High School Seniors; Removing Barriers to Career Succes*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra U. 2010. *Adminstrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukmadinata, Nana Sayodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suhardan, Dadang dkk. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- TIM Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1). 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Surabaya: UNESA University Press.
- Ulfatin, Nurul. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya: Studi Kasus, Etnografi, Interaksi Simbolik dan Penelitian Tindakan pada Konteks Manajemen Pendidikan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.